

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan sepanjang tahun 2016, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan. Beberapa bidang permasalahan utama yang masih perlu menjadi perhatian di tahun 2018 adalah:

- Aparatur dan pengendalian internal
- Daya saing ekonomi lokal
- Mitigasi dan penanggulangan bencana
- Kualitas lingkungan hidup
- Pelestarian budaya lokal
- Minat dan budaya membaca
- Pembinaan kepemudaan
- Pengembangan prestasi olahraga
- Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi
- Pemberdayaan PMKS usia produktif
- Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan formal
- Pengelolaan sumber penerimaan daerah
- Penyediaan dan pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
- Distribusi komoditas pangan
- Efektivitas dan efisiensi sistem drainase kota terpadu
- Pelayanan utilitas kota
- Penyediaan dan sertifikasi aset tanah
- Kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar
- Aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan
- Pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
- Pengembangan pariwisata
- Pengembangan perdagangan/city logistic
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja
- Pengembangan wawasan kebangsaan
- Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

Adapun proses perumusan permasalahan pembangunan di Kota Surabaya untuk RKPD Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan permasalahan yang timbul dalam pencapaian sasaran pembangunan dan indikator kinerja utama (IKU) pembangunan menurut RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Adapun capaian sasaran pembangunan dan IKU dengan capaian kurang dari 100% pada Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel II.171
Evaluasi Capaian Sasaran Pembangunan dan IKU Kota Surabaya Tahun 2016 yang Kurang dari 100%

Sasaran Pembangunan	IKU Kota	Capaian
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Angka pelanggaran disiplin aparatur per 1.000 pegawai	60,06%
	Persentase aparatur (struktural dan non struktural) yang kompeten	72,62%
Meningkatkan produktivitas koperasi	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	64,86%
Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	71,42%
Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan reading text levelling	72,97%
Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	Persentase atlet yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional	74,43%
Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Load factor kendaraan umum (Angkot)	82,95%
	Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	91,07%
Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya \geq 1 juta rupiah per bulan	82,97%
Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	89,75%
Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90,37%

Sasaran Pembangunan	IKU Kota	Capaian
kualitas pendidikan formal	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,03%
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	96,48%
Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	91,17%
	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	99,91%
Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	93,28%
Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	96,58%
Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase Budaya yang dapat dilestarikan	98,46%
Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks genangan	99,82%

Ketidaktercapaian IKU Kota pada Tabel II.171 tersebut dievaluasi lebih lanjut untuk diketahui permasalahan beserta faktor penghambat dan faktor yang menjadi penentu keberhasilan ke depannya. Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian sasaran pembangunan dan IKU Kota Surabaya Tahun 2016, disebutkan pada tabel berikut.

Tabel II.172
Identifikasi Permasalahan Pembangunan sesuai Hasil Evaluasi Capaian Sasaran
Pembangunan dan IKU Kota Surabaya Tahun 2016

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Masih relatif tingginya angka pelanggaran disiplin aparatur Kurang optimalnya peningkatan kompetensi pejabat struktural 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing Adanya pengawasan melekat (waskat) terkait pelanggaran disiplin kepada PNS di lingkungan PD masing-masing Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman PD terhadap peraturan tentang disiplin aparatur Kurang efektifnya mekanisme pengendalian internal di lingkungan PD masing-masing Penyelenggaraan diklat peningkatan kompetensi aparatur yang sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2.	Meningkatkan produktivitas koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya ketidakselarasan dalam penetapan target program dan target sasaran pertumbuhan produktivitas koperasi Produktivitas dari banyaknya koperasi yang direvitalisasi tidak masuk dalam perhitungan di 2016 karena belum ber-RAT lagi 	Adanya pendampingan dalam rangka meningkatkan omzet koperasi baik yang telah aktif, maupun yang baru direvitalisasi	Kurang optimalnya penetapan kinerja perencanaan untuk mendorong tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi
3.	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Adanya kendala dalam penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan lapangan olahraga sebagai RTH Penambahan panjang dan lebar jalur hijau 	Adanya kendala proses pembebasan lahan pada kegiatan pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau
4.	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Masih kurangnya kemampuan membaca siswa	Adanya pemetaan untuk pelaksanaan pendampingan di sekolah, khususnya pada sekolah yang hasil <i>reading text level</i> (RTL) siswanya masih kurang	Kurang berimbang jumlah petugas dengan jumlah perpustakaan sehingga tidak tersedia cukup tenaga dan waktu dalam melaksanakan pendampingan

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
5.	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	Kurangnya atlet yang berprestasi di kejuaraan skala nasional dan internasional	Peningkatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat regional	Minimnya penyelenggaraan kejuaraan olahraga skala nasional dan internasional
6.	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Rendahnya penggunaan angkutan umum (<i>load factor</i>) Bus Kota dan Angkot	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan proses realisasi sistem <i>buy the service pilot project</i> rute MERR (<i>Middle East Ring-Road</i>) • Dilakukan restrukturisasi angkutan umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan • Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau, seperti kendaraan pribadi dan angkutan berbasis <i>online</i> • Belum tersedianya transportasi massal yang terintegrasi dengan rute angkutan umum sehingga lebih memilih penggunaan kendaraan pribadi
7.	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Kurangnya minat masyarakat dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk terlibat aktif dalam kelompok-kelompok usaha mandiri	Adanya <i>assessment</i> untuk menilai kesiapan peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta banyak yang memilih tetap melanjutkan bekerja di pabrik/di toko • Peserta memilih bekerja sebagai babysitter (pengasuh bayi) • Peserta kembali bekerja sebagai guru/bunda PAUD • Peserta dilarang oleh suaminya • Lebih memilih untuk mengasuh anak/cucu • Peserta sakit/hamil • Peserta tidak berminat lagi (orientasi pada bantuan modal)

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
8.	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Kurangnya jumlah pemuda kader anti kenakalan remaja untuk mendorong peningkatan wawasan dan karakter kebangsaan pemuda dan organisasi pemuda	Pelaksanaan kegiatan pembentukan kader yang lebih variatif dan dilaksanakan di Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pembentukan kader berlokasi di luar Kota Surabaya • Kegiatan yang akan dilakukan bersifat non-profit
9.	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya penduduk yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SD/MI atau mengakses pendidikan tingkat SD/MI di luar Kota Surabaya • Masih adanya yang belum dapat mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs atau mengakses pendidikan tingkat SMP/MTs di luar Kota Surabaya • Masih ada sebagian siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, utamanya di kecamatan/kelurahan yang masih kekurangan • Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya pertumbuhan penduduk usia sekolah, yang lebih tinggi dari angka proyeksi • Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas usia yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs
10.	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Masih belum optimalnya kontribusi bagi hasil BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah • Perlunya peningkatan kontribusi pendapatan dari pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong PD. Rumah Potong Hewan (RPH) untuk mengoptimalkan utilisasi aset produksi dan menekan <i>fixed cost</i> atas penyusutan aset tidak lancar, mengoptimalkan penggalan sumber-sumber pendapatan baru, serta menekan piutang macet • Penerapan sistem pajak secara <i>online</i> sebagai upaya intensifikasi pajak daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja BUMD RPH (Rumah Potong Hewan) yang di bawah ekspektasi • Perolehan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang sedikit di atas target menyebabkan kontribusi pajak terhadap PAD di bawah target

No.	Sasaran Pembangunan	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan	Faktor Penghambat
11.	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Belum optimalnya luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	Melakukan percepatan proses serah terima fasilitas umum/ fasilitas sosial perumahan oleh pengembang	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat masalah pada status lahan pada kawasan permukiman pengembang yang akan diintervensi • Kurangnya partisipasi aktif pengembang untuk proses serah terima fasus/fasos perumahan sehingga menghambat upaya peningkatan layanan sarana prasarana permukiman
12.	Meningkatkan distribusi pangan	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan yang relatif rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan <i>city logistic</i> melalui Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial • Penyediaan bahan pangan mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan bahan pangan sangat tergantung terhadap pasokan dari daerah yang rantai distribusinya terlalu panjang • Efektifitas dan efisiensi sistem distribusi barang perlu diperbaiki • Gagal panen karena kendala cuaca • Kenaikan harga BBM
13.	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian budaya lokal, utamanya terkait pelestarian kesenian dan cagar budaya	Penyelenggaraan pentas seni budaya lokal pada berbagai even secara konsisten	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman pengaruh budaya luar terhadap pelestarian budaya lokal karena globalisasi • Pemeliharaan bangunan/situs cagar budaya yang belum konsisten
14.	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Masih relatif tingginya indeks genangan	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm • Pembangunan pompa masih berproses • Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan • Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dirumuskan dengan mengevaluasi pencapaian program pembangunan serta data-data pembangunan daerah. Adapun capaian indikator program Tahun 2016 yang kurang dari 100% disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.173
Capaian Penyelenggaraan Urusan melalui Program Pembangunan Tahun 2016 yang Kurang dari 100%

Urusan	Program	Indikator	Capaian
Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi	0,00%
Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih	0,00%
Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produktivitas Usaha Garam	1,96%
Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	49,89%
Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	50,65%
		Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,56%
Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Tingkat Genangan	63,34%
Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	68,70%
Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	80,72%
Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan	84,39%
Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Rasio aset pemkot yang tersertifikat	85,21%

Urusan	Program	Indikator	Capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	85,61%
		Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	89,19%
Urusan Pilihan Bidang Pertanian	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani	87,10%
Urusan Wajib Bidang Perhubungan	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	87,12%
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Sekunder	91,70%
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Primer	94,77%
		Rata-rata Headway Angkutan Umum (Bus Kota)	96,89%
		Rata-rata Headway Angkutan Umum (Angkot)	97,72%
Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA	87,76%
Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	89,63%
Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	90,37%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	96,03%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	96,48%
Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	93,11%
Urusan Wajib Bidang Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	97,77%

Ketidaktercapaian indikator program pembangunan sebagai tolak ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tabel di atas dievaluasi lebih lanjut untuk diketahui permasalahan beserta faktor penghambat dan faktor yang menjadi penentu keberhasilan ke depannya. Adapun hasil evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan pencapaian program pembangunan daerah tahun 2016 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel II.174
Identifikasi Permasalahan Pembangunan sesuai Hasil Evaluasi Capaian Penyelenggaraan Urusan melalui
Program Pembangunan Daerah Tahun 2016

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Masih rendahnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Penyelenggaraan diklat sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur
	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Masih rendahnya jumlah tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada tahun berikutnya	Penambahan jumlah auditor dan peningkatan kompetensi auditor	Tidak berimbangnya jumlah auditor dengan kebutuhan pemeriksaan yang ada (354 temuan)
2.	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Sangat rendahnya produktifitas pertanian garam	Pengembangan Teknologi Tepat Guna, salah satunya sedang dilakukan uji coba produksi garam dengan teknologi rumah kaca	1. Lemahnya penerapan teknologi dalam produksi garam sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca 2. Adanya perubahan iklim/cuaca sehingga jumlah hari hujan per bulan lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 11,5 hari per bulan
3.	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Optimal terhadap luasan seluruh RTH Kota Surabaya masih relatif kurang	1. Prioritisasi jenis RTH yang perlu diptimalkan serta prioritasasi lokasi berdasarkan analisa kebutuhan 2. Analisis permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya	1. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota 2. Adanya kendala pasang surut air laut terutama di kawasan pesisir

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
				dioptimalkan namun belum tercapai	
	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA	<p>1. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap produksi volume sampah dan sumber-sumber yang berkontribusi cukup dominan dalam peningkatan produksi sampah kota, untuk mempermudah penentuan intervensi terhadap objek-objek yang disasar</p> <p>2. Peningkatan upaya pengurangan produksi sampah melalui 3R serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penerapan 3R serta pemilahan sampah</p> <p>3. Peningkatan jumlah TPS dengan pengelolaan sampah mandiri/3R, untuk mengurangi beban volume sampah yang dikelola TPA</p>	Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa mempengaruhi peningkatan volume sampah hotel, apartemen, dan mall, demikian pula migrasi penduduk di sekitar wilayah Surabaya juga mempengaruhi peningkatan volume sampah rumah tangga
5.	Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Belum optimalnya cakupan pembinaan pemuda	Variasi kegiatan pembinaan untuk menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang pemuda yang diberi pembinaan	Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepemudaan

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
6.	Urusan Wajib Bidang Perhubungan	Program Pengembangan Sistem Transportasi	<p>1. Kurangnya optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari <i>headway</i> maupun <i>load factor</i>-nya</p> <p>2. Kurang seimbangya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan</p>	<p>1. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum</p> <p>2. Percepatan proses pembangunan Angkutan Massal dan pelaksanaan <i>traffic demand management</i></p>	<p>1. Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan</p> <p>2. Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau (taksi <i>online</i>)</p> <p>3. Pertumbuhan kendaraan pribadi kurang sebanding dengan pembangunan jaringan jalan sehingga terjadi penurunan kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di jalan arteri primer dan sekunder</p>
7	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan	-	Tidak ada dukungan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa kejuruan, karena kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan pada siswa yang telah lulus tahun 2016 dan adanya proses pelimpahan P2D (Personil, Peralatan dan Dokumen) ke Provinsi Jawa Timur
	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Masih rendahnya partisipasi murni PAUD	Edukasi pada orang tua/ wali siswa supaya menyekolahkan PAUD di usia yang tepat, serta tidak terlalu dini untuk masuk ke jenjang SD/MI	Banyaknya usia siswa PAUD yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan (5,35% siswa PAUD masih dibawah usia 3 tahun), terlebih lagi, batas usia atas yang melanjutkan ke jenjang SD/MI terlalu dini

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya partisipasi murni SD/MI 2. Belum optimalnya partisipasi kasar SMP/MTs 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan pemerataan perbaikan sarana dan prasarana sekolah 2. Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas bawah usia yang melanjutkan dari PAUD 2. Terbatasnya kapasitas SMP/MTs atau banyaknya warg Surabaya usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar kota
8	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan 3. Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi 4. Rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengefektifkan metode dalam proses penyusunan dokumen keuangan, sehingga pihak-pihak eksternal dapat berkontribusi terhadap percepatan penyusunan 2. Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan yang melibatkan pihak eksternal BPKPD & Pemerintah Kota Surabaya 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat (Permenkeu Nomor 249/PMK.07/2015 dan 162/PMK.07/2016) 3. Adanya ketidakjelasan dalam Petunjuk teknis penggunaan dana baik pemerintah pusat maupun Propinsi Jawa Timur yang mempengaruhi realisasi belanja 4. Adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
9	Urusan Pilihan Bidang Pertanian	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Masih kurangnya cakupan penyuluh terhadap jumlah kelompok tani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan lebih intensif 2. Fasilitasi permodalan dg stakeholder yang menawarkan program kredit rakyat 3. Pengalihan dari komoditas segar ke olahan 	Kelompok tani yang didampingi tidak aktif lagi karena masalah internal, alih profesi, dll.
10	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Masih relatif tingginya tingkat genangan	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm 2. Pembangunan pompa masih berproses 3. Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan 4. Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun
11	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif	Berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih harus melalui penyertaan modal ke PDAM terlebih dahulu
12	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Luasan bangunan dan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu ditingkatkan	Percepatan proses pengadaan tanah dengan mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu proses administrasi yang cukup panjang 2. Melibatkan beberapa instansi serta masyarakat 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia

No.	Urusan	Program	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
13	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Masih kurangnya realisasi jumlah aset tanah pemkot yang tersertifikat dibandingkan jumlah aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan	1. Pemenuhan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi 2. Koordinasi dengan instansi terkait	Kendala dalam pemenuhan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan permohonan sertifikasi (bukti perolehan pengadaan tanah, bukti penguasaan atas tanah)
14	Urusan Wajib Bidang Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Masih adanya tenaga kesehatan yang belum teregistrasi	Melakukan updating rutin, serta secara aktif mengingatkan personil tenaga kesehatan yang telah habis masa berlaku STR-nya, dan mendorong untuk segera memperbarui	Beberapa tenaga kesehatan telah habis masa berlaku STR (Surat Tanda Registrasi)-nya di bulan Desember, sehingga harus menunggu proses perpanjangan STR di PTSP Provinsi Jatim selama 12 hari.
15	Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Masih banyak masyarakat yang terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, baik akta kematian maupun akta kelahiran	Melaksanakan publikasi dan sosialisasi yang inovatif dan persuasif lewat berbagai media, selain tetap menerapkan denda bagi pemohon yang terlambat	Kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dan kematian

Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilaksanakan berdasarkan data-data penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dengan hasil evaluasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.175
Identifikasi Permasalahan Pembangunan sesuai Hasil Evaluasi Data-Data Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2016

No.	Urusan	Evaluasi Data Pembangunan	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
1.	Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Terdapat 6 lokasi sentra usaha mikro produksi barang dan jasa mengalami penurunan omzet dari tahun 2015	Masih ada sebagian sentra usaha mikro produksi barang dan jasa yang mengalami penurunan omzet dibandingkan tahun sebelumnya	Adanya usaha yang kontinyu dari pemerintah kota untuk membuka lokasi sentra baru	Kurangnya akomodasi dan akses bagi konsumen untuk menjangkau sentra-sentra tersebut
2.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Sebesar 74,7% (251) lembaga pendidikan non formal belum terakreditasi	Masih ada sebagian lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi	Kontinuitas pembinaan dan fasilitasi terhadap PKBM dan LKP	Terbatasnya anggaran sedangkan jumlah lembaga pendidikan non formal yang belum terakreditasi cukup banyak
3.	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Masih ada 146.905 (4,49%) warga Surabaya belum mendapatkan akses air bersih PDAM	Masih ada sebagian warga Surabaya yang belum mendapatkan akses air bersih PDAM	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif sehingga dapat terbangun jaringan air bersih sebanyak 125.066 m	Penambahan jaringan air bersih tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui mekanisme penyertaan modal ke BUMD PDAM
4.	Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingginya jumlah kasus KDRT (77 kasus) dibandingkan tahun 2014 (70 kasus) dan 2015 (41 kasus)	Adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan	Adanya PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih adanya ketakutan masyarakat untuk melaporkan adanya kejadian KDRT

No.	Urusan	Evaluasi Data Pembangunan	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
5.	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata	Kurang memadainya fasilitas bagi wisatawan di tempat wisata ketika <i>peak season</i>	Belum optimalnya pengembangan fasilitas di ODTW	Pengembangan dan peningkatan manajemen obyek wisata unggulan untuk menanggulangi over-kapasitas tempat wisata	Keterbatasan lahan untuk peningkatan kapasitas daya tampung obyek wisata
6.	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan	Tingginya potensi permasalahan angkutan jalan disebabkan tingginya aktivitas perdagangan	Meningkatnya potensi permasalahan angkutan jalan karena adanya peningkatan aktivitas perdagangan	Adanya perhatian pemerintah kota dalam pengembangan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Banyaknya pihak yang terlibat di luar pemerintah kota sehingga menimbulkan potensi permasalahan dalam koordinasi, komunikasi serta kerjasama dengan seluruh stakeholder
7.	Urusan Wajib Tenaga Kerja	Masih relatif tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang mencapai 7,01% di akhir tahun 2015 dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur sebesar 4,47% dan nasional sebesar 6,18%	Masih relatif tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya	<p>1. Adanya kegiatan yang lebih intensif dan inovatif untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja</p> <p>2. Dilakukan <i>upgrading</i> kemampuan dan keterampilan, serta mental para pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan</p>	Banyaknya penganggur yang berasal dari lulusan SMA dan SMK

No.	Urusan	Evaluasi Data Pembangunan	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Faktor-faktor Penghambat
8.	Urusan Wajib Kebudayaan	Berdasarkan hasil survey, kesadaran masyarakat untuk mengawal sistem keamanan lingkungan dan mengenal tokoh pejuang asli Surabaya masih relatif rendah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengawal sistem keamanan lingkungan dan mengenal tokoh pejuang asli Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan kegiatan untuk menyadarkan masyarakat agar ikut berperan dalam mengawal sistem keamanan lingkungan. 2. Diadakan kegiatan yang dapat menyadarkan dan mengingatkan masyarakat (anak-anak maupun dewasa) atas jasa tokoh pejuang asli Surabaya 	Tingginya pengaruh budaya luar dan tuntutan globalisasi yang menyebabkan minimnya interaksi antar tetangga kampung
9.	Urusan Wajib Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingginya jumlah kejadian unjuk rasa di bidang sosial budaya (165 kejadian) dibandingkan tahun 2015 (129 kejadian)	Adanya peningkatan jumlah kejadian unjuk rasa di bidang sosial budaya dibandingkan tahun sebelumnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait 2. Tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban kota 	Adanya kelompok warga pendatang yang kurang memahami norma masyarakat yang sudah lebih dahulu ada

2.3.3 Identifikasi kebijakan nasional/provinsi dan dinamika lingkungan eksternal lainnya

Identifikasi permasalahan pembangunan juga diperoleh dari kebijakan nasional, provinsi dan sumber lainnya yang relevan sesuai dengan dinamika lingkungan eksternal, dijelaskan sebagai berikut.

Tabel II.176
Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Sumber Lainnya

Isu Penting dan Masalah Mendesak	
Tingkat Nasional	
Rancangan Tema RKP 2018: Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan, yang menekankan pada 10 Prioritas Nasional	
1	Pendidikan
2	Kesehatan
3	Perumahan dan Permukiman
4	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5	Ketahanan Energi
6	Ketahanan Pangan
7	Penanggulangan Kemiskinan
8	Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9	Pembangunan Wilayah
10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Tingkat Provinsi (Jawa Timur)	
Rancangan Tema RKPD Jawa Timur 2018 : Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur, dengan strategi pembangunan SDM dan pembangunan fisik untuk peningkatan industri dan perdagangan melalui sektor:	
1	Pendidikan
2	Kesehatan
3	Energi
4	Transportasi dan Jalan
5	Sumber daya Air
Lingkungan Eksternal Lainnya	
INDEF (Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017): Menguji Ketangguhan Ekonomi Indonesia	
1	Pertumbuhan ekonomi
2	Inflasi
3	Nilai Tukar
4	Tingkat Pengangguran Terbuka
5	Tingkat Kemiskinan

Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan World Food Programme /WFP(Food Security dan Vulnerability Atlas of Indonesia 2015) :	
1	Meningkatkan akses ekonomi terhadap pangan melalui investasi infrastruktur berkelanjutan
2	Percepatan pencegahan dan penurunan malnutrisi
3	Penanganan terhadap peningkatan kerawanan pangan akibat bahaya perubahan cuaca
Nielsen (2017) : Indonesia Market - Waiting for The Wave	
1	Ketidakmerataan pendapatan
2	Inflasi
3	Penurunan Nilai Tukar mata uang
4	Korupsi

Hasil identifikasi permasalahan yang bersumber dari evaluasi capaian pelaksanaan sasaran pembangunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan serta isu strategis yang dijelaskan sebagaimana di atas, menghasilkan faktor penghambat dan faktor penentu keberhasilan sebagai bahan dalam penentuan prioritas pembangunan 2018 pada bab berikutnya.